

## PERLUASAN ORIENTASI PENDIDIKAN POLITIK MELALUI MKU

Oleh :

Lusila Andriani Purwastuti  
(FPIPS IKIP Yogyakarta)

### Abstrak

Kondisi perpolitikan di Indonesia sedang *sakit* pada saat ini. Banyak faktor yang menyebabkan keadaan ini. Faktor utama yang menyebabkannya adalah perangkat politik atau struktur politik yang ada tidak fungsional. Faktor lainnya adalah kekurangtepatan praktik pendidikan politik pada masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi siswa atau mahasiswa. Kekurangtepatan ini disebabkan karena pendidikan politik yang ada selama ini menitikberatkan pada bagaimana memperoleh kekuasaan dan terjaminnya stabilitas nasional sehingga tidak menyentuh dimensi hidup kemanusiaan yang paling mendasar, yaitu hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya pendidikan politik diperluas orientasinya. Pendidikan politik bukan sekedar berorientasi pada sosialisasi politik, tetapi diperluas sebagai sosialisasi hak-hak asasi manusia (HAM). Alasannya, pertama hak politik hanya bagian kecil dari HAM. Kedua, HAM merupakan isu yang menonjol pada era global. Ketiga, pendidikan politik pada hakikatnya adalah pemberdayaan manusia dalam bidang politik. Atau dengan kata lain sebagai upaya memanusiakan manusia dalam bidang politik. Pendidikan politik pada hakikatnya adalah membuka kesadaran bahwa politik bukan merupakan wahana aktualisasi nilai-nilai kekuasaan, tetapi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Salah satu bagian masyarakat yang menjadi sasaran pendidikan politik adalah mahasiswa. Sedangkan pendidikan politik yang berorientasi pada HAM tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal atau pun nonformal. Pada Perguruan Tinggi pendidikan politik secara kurikuler terintegrasi pada Mata Kuliah Umum (MKU). Dalam rangka peralihan IKIP menjadi Universitas, jurusan MKU dapat memulai atau memelopori untuk melaksanakan pendidikan politik yang berorientasi pada HAM. Bagaimana nilai-nilai HAM dapat diintegrasikan ke dalam semua MKU sehingga MKU merupakan bekal bagi mahasiswa untuk semakin bertindak dewasa dan bertanggung jawab dalam bidang politik yang akhirnya akan membawa kondisi politik di Indonesia menjadi *berwajah* manusiawi.

Kata Kunci: Perluasan Orientasi, Pendidikan Politik, MKU

### EXTENSION OF THE ORIENTATION OF POLITICAL EDUCATION THROUGH GENERAL SUBJECT CLASSES

### Abstract

The political condition in Indonesia is poor at present. This condition is caused by a lot of factors. The main factor causing it is the existing political structure, which is not functional. Another factor is the inappropriate practice of

political education for society in general and students in particular. This present inappropriate political education is focussed on how to obtain power and how to guarantee national stability, so that it does not reach the most fundamental dimension of human life, namely, human rights. Therefore, it is about time that the orientation of political education be extended.

The political education should not be simply oriented to political socialization of human rights. The reasons are that, firstly, political rights are just a small part of human rights, secondly, human rights are a dominant issue in the globalization era, and, thirdly, political education is essentially opening the consciousness that the political field is not a means of actualizing power values but rather a means of actualizing the noble values of humanism.

One part of society to be the target of political education is college students, to whom the political education oriented to human rights can be performed through formal or nonformal education. In the college, political education is curricularly integrated in the general subject classes. In the course of the conversion of IKIP into a university, the MKU (short for Mata Kuliah Umum, meaning general subject classes) can be the stepping stones to initiate the implementation of political education oriented to human rights. There should be ways to integrate the values of human rights into the general subject classes as a whole in order that these classes can equip students in becoming more mature and responsible in playing a part in the political field so that it will finally help to bring the political condition in Indonesia to becoming one more human.

Key Words: Orientational extension, Political Education, MKU

### Pendahuluan

Kondisi politik di Indonesia pada saat ini sedang mengalami krisis dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis ini terjadi karena adanya krisis legitimasi, yaitu adanya ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Fenomena ini tentunya menjadi keprihatinan bagi bangsa Indonesia, khususnya dunia pendidikan.

Salah satu upaya yang dianggap strategis untuk memecahkan permasalahan itu adalah melalui pendidikan politik bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan bagi mahasiswa ada khususnya. Pendidikan politik bagi mahasiswa merupakan hal yang penting dan mendasar. Arbi Sanit (1981:107) mengatakan bahwa mahasiswa sebagai "elit" dari masyarakat mempunyai karakteristik sendiri yang merupakan faktor pendorong bagi meningkatnya

peranan mereka di dalam kehidupan politik angkatan muda.

Dalam konteks pendidikan politik di Perguruan Tinggi, pendidikan ini dapat dilakukan secara kurikuler dan ekstrakurikuler. Secara kurikuler, pendidikan politik terintegrasi dalam semua Mata Kuliah Umum. Tujuan Program Mata Kuliah Umum yang secara spesifik antara lain disebutkan dalam Kurikulum Inti Matakuliah Umum, yaitu untuk menghasilkan warganegara sarjana yang berkualifikasi memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral dalam menyikapi permasalahan kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, pertahanan-keamanan maupun kebudayaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, SK No. 32/DJ/Kep/1983).

Pendidikan politik pada umumnya dan khususnya melalui Mata Kuliah MKU pada saat ini lebih menekankan pada aspek stabilitas nasional dan kekuasaan sehingga belum menyentuh pada dimensi kehidupan manusia yang mendasar yaitu Hak-hak Asasi Manusia. Pendidikan politik pada saat ini menitikberatkan pada bagaimana upaya agar warga negara pada umumnya, dan khususnya mahasiswa sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bukan pada kesadaran bahwa politik pada hakikatnya adalah aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan. Tulisan ini merupakan telaah filosofis terhadap pendidikan politik melalui MKU yang terjadi pada saat ini.

### Hakikat Pendidikan Politik

Pengertian pendidikan politik dapat dirunut dari unsur kata, yaitu pendidikan dan politik. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab I, pasal 1, ayat (1) mengatakan bahwa pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa mendatang. Imam Barnadib (1994:16) mengatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha manusia yang disengaja untuk memimpin angkatan muda untuk mencapai kedewasaan dan meningkatkan taraf kesejahteraan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat dan bangsanya. Pendidikan merupakan proses pendewasaan peserta didik, agar menjadi manusia yang berpikir dan bertindak dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab sehingga meningkatkan kesejahteraan diri, masyarakat, dan bangsanya.

Ensiklopedi Politik Pembangunan (1984:151) mengartikan politik sebagai seni mengatur dan mengurus negara, atau dapat pula dikatakan sebagai ilmu kenegaraan. Ramlan Surbakti (1992:2) mengatakan bahwa substansi politik berkaitan dengan lima hal, yaitu: pertama, usaha-usaha yang ditempuh warga negara

untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Sementara itu, dalam Ensiklopedi Indonesia (1992:2739), disebutkan bahwa politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, lembaga-lembaga dan proses politik, kelompok-kelompok penekan (*pressure group*), hubungan-hubungan internasional, dan tata pemerintahan. Semuanya ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok yang menyangkut hubungan kemanusiaan secara mendasar.

Pendidikan Politik secara etimologi diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui berbagai aktivitas mulai dari bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa mendatang dalam bidang politik. Pengertian pendidikan politik dengan demikian mempunyai aspek jangkauan yang sangat luas, baik dari bentuk kegiatan maupun dari objek materi politik yang diberikan. Pendidikan politik dilihat dari bentuk kegiatannya dapat berupa pengajaran, bimbingan, dan latihan dalam bidang politik, sedangkan objek materi politik mencakup lima substansi politik sebagaimana dijelaskan di atas.

Beberapa ahli telah memberi definisi mengenai pendidikan politik. Alfian (1986:245) memberi arti pendidikan politik, dalam arti sempit dan arti longgar. Pendidikan politik dalam arti longgar berlangsung secara integral berkaitan dengan semua aspek kehidupan kemasyarakatan. Aristoteles mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah zoon politikon (makhluk politik). Pendidikan politik dalam arti sempit merupakan upaya untuk mensosialisasikan nilai-nilai dari sistem politik yang dianggap ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik, bagi Alfian mempunyai kaitan erat dengan pembangunan atau pembaharuan di bidang politik. Kunci dari pembaharuan kebudayaan politik adalah sosialisasi politik.

Pendidikan politik menurut Alfian merupakan sosialisasi nilai-nilai dari sistem politik ideal yang hendak dibangun oleh suatu bangsa sehingga timbul kebudayaan baru dalam bidang politik. Pengertian ini menjadi pengertian yang terbatas pada dimensi pembangunan sistem politik ideal. Sistem politik ideal yang hendak dibangun bagi bangsa Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan ini mempunyai keterkaitan dengan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam bidang politik, khususnya terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih demokratis.

Pendidikan Politik dalam Ensiklopedi Politik Pembangunan (1984:83) diartikan sebagai segala usaha oleh keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait yang bertujuan membangun sikap dan tingkah laku serta pengetahuan dan ketrampilan yang perlu dan berguna demi kelangsungan dan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada perkembangan menyeluruh masing-masing pribadi anggota masyarakat dalam bidang politik. Pengertian pendidikan politik ini memberi batasan yang demikian luas sehingga fokus dan substansi politik mana yang mendapat prioritas tidak tampak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan politik lebih menitikberatkan pada usaha-usaha memperoleh kesejahteraan, bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, serta bagaimana mengatasi agar dalam masyarakat tidak terjadi konflik atau terjaminnya stabilitas nasional. Praktik pendidikan politik melalui kurikulum di sekolah pada saat ini mempunyai kecenderungan berorientasi pada kesadaran akan hak dan kewajiban serta terjaganya stabilitas nasional, sedangkan pendidikan politik untuk rakyat pada umumnya cenderung pada bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, misalnya, masalah pengkaderan orsospol, penggalangan massa, dan berbagai fenomena mengenai bagaimana cara-cara suatu kekuatan politik mempertahankan dan merebut kekuasaan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Mata Kuliah Umum (MKU) merupakan sarana yang efektif untuk pendidikan politik di perguruan tinggi. Sunarso (1995:ix) mengatakan bahwa MKU memberi sumbangan yang cukup besar bagi pembentukan sikap nasionalisme. Akung Karsimin (1980:20) mengatakan bahwa MKU (pendidikan agama, P4, dan pendidikan kewiraan) mempunyai peranan yang positif dalam pengembangan sikap patriotisme. Hasil penelitian L. Andriani Purwastuti (1997:88) menunjukkan bahwa analisis isi terhadap kurikulum MKU juga menunjukkan bahwa MKU berisi materi-materi yang berkaitan dengan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan demokrasi. L. Andriani Purwastuti (1998:81) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sebagian besar materi yang terdapat dalam buku ajar Pendidikan politik di MKU IKIP Yogyakarta berkaitan dengan politik dalam pengertian sebagai kebijakan pemerintah dan sosialisasi nilai persatuan untuk terciptanya stabilitas nasional. Sementara itu Ekram Prawiroputro (1993:57) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengetahuan mahasiswa IKIP Yogyakarta di bidang politik sangat minim. Kekurangpengetahuan ini disebabkan karena

materi yang diberikan memberi penekanan pada aspek tertentu saja sehingga aspek yang lain tidak diketahui.

Praktik-praktik pendidikan politik tersebut tentunya tidak terlepas dari konsep pendidikan politiknya. Jika konsep yang digunakan selama ini adalah konsep sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan politik tidak akan pernah membawa pada perubahan kehidupan yang semakin manusiawi. Oleh karena itu, perlu adanya perluasan orientasi terhadap pendidikan politik, suatu perluasan wawasan bahwa pada hakikatnya pendidikan politik adalah upaya penyadaran kepada peserta didik bahwa politik secara substansial bukan sebagai aktualisasi nilai-nilai kekuasaan, tetapi sebagai aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan atau HAM. Dengan kata lain, pendidikan politik adalah proses pendewasaan dan memberdayakan peserta didik dalam bidang politik sehingga mereka sadar dan bertanggung jawab bahwa bidang ini akan menjadi berwajah manusiawi atau tidak berada di tangannya.

### **Pendidikan Politik yang Berorientasi pada Hak Asasi Manusia**

Bertitik tolak dari uraian di atas, orientasi pendidikan politik perlu diperluas. Pendidikan politik tidak saja berorientasi pada politik dalam pengertian hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kenegaraan, kekuasaan, stabilitas nasional, tetapi diperluas orientasinya haitu pada nilai-nilai kemanusiaan, khususnya yang terdapat pada hak asasi manusia (HAM). HAM dalam pengertian yang umum universal, yaitu hak kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena manusia adalah makhluk ciptaan-Nya. Pendidikan politik sebagai proses pendewasaan dan pemberdayaan peserta didik dalam bidang politik dari satu sisi dapat dilihat sebagai sosialisasi politik. Almond dalam Mochtar Mas'ood (1988: 37-40) mengatakan bahwa ada enam sarana yang dapat digunakan sebagai alat sosialisasi politik. Keenam sarana tersebut adalah keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, serta kontak-kontak politik. Sosialisasi, dalam konteks sosiologi pendidikan sebagaimana dikatakan oleh St. Vembriarto (1993:20) diartikan sebagai proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Dalam proses ini individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku dan standar tingkah laku dalam masyarakat di mana ia hidup sehingga menjadi kesatuan sistem dalam diri pribadinya. Jika pendidikan politik diperluas orientasinya pada HAM, maka dalam konteks pendidikan sebagai sosialisasi nilai akan berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam HAM yang ingin diakomodasikan

kepada kepada peserta didik (rakyat pada umumnya, siswa atau mahasiswa). Peserta didik dapat mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola tingkah laku dan standar tingkah laku yang dijiwai oleh nilai-nilai kemanusiaan sehingga mereka dapat bertindak sebagai subjek politik yang bermartabat. Kesemuanya ini bertujuan agar dunia politik merupakan wahana aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur sehingga wajah dunia perpolitikan Indonesia semakin manusiawi.

Hak asasi manusia kadangkala dipahami sebagai produk individualisme dan liberalisme. Pemahaman ini terjadi karena orang tidak memahami hak asasi manusia secara lengkap. Menurut sejarahnya, paham liberalismelah yang pertama kali mencetuskan dan memperjuangkan konsep hak asasi manusia sebagai kritik atas absolutisme yang terjadi pada jamannya. Akan tetapi konsep hak asasi manusia secara evolutif berkembang sehingga pengertian hak asasi manusia tentunya tidak identik lagi dengan gagasan yang dicetuskan pertama kali oleh liberalisme. Hak asasi manusia adalah hak kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena kemartabatannya sebagai manusia. Hak ini merupakan hak yang melekat secara inheren dalam diri manusia karena kemartabatannya. Hak ini tidak dapat diganggu gugat oleh institusi mana pun, termasuk negara. Artinya, walau pun negara tidak mengakui dan menjamin HAM, hak ini secara kodrati tetap melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hak asasi ini merupakan tuntutan dan perjuangan manusia selama ia bereksistensi. Pada saat ini, tuntutan dan perjuangan manusia akan hak asasi ini tidak terbatas hanya pada hak asasi liberal, tetapi meliputi hak asasi demokratis, hak asasi positif, dan hak asasi sosial.

Franz Magnis Suseno (1994: 126-129) mengatakan bahwa HAM dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu: Hak Asasi Liberal, Hak Asasi Demokratis, Hak Asasi Positif, dan Hak Asasi Sosial. Hak asasi liberal merumuskan bidang-bidang minimal kehidupan manusia yang harus bebas dari pemaksaan oleh masyarakat. Hak-hak itu sangat penting demi keutuhan manusia. Otonomi manusia atas kehidupan pribadinya perlu dijamin karena adanya tendensi totaliter negara modern untuk mengatur semua segi kehidupan manusia. Hak asasi demokratis merupakan hak rakyat untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Semua orang sama derajatnya sebagai manusia, urusan bersama menjadi hak mereka semua. Hak asasi positif merupakan hak rakyat untuk menuntut pelayanan dari negara. Hak utama ini adalah hak atas perlindungan hukum. Paham hak asasi positif berdasarkan asumsi bahwa negara merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberi pelayanan-pelayanan tertentu. Hak asasi sosial mencerminkan kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta

benda material dan kultural bangsanya dan atas bagian yang wajar dari hasil ekonomis yang terus menerus diciptakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan sistem pembagian kerja sosial.

Pendidikan politik berarti upaya mengakomodasikan nilai-nilai yang terkandung dalam keempat kelompok HAM tersebut. Sosialisasi nilai-nilai HAM ini tidak boleh menekankan pada salah satu kelompok saja. Penekanan pada salah satu kelompok ini, justru mengakibatkan makna HAM menjadi terdistorsi. Sosialisasi keempat kelompok HAM ini harus dilakukan secara seimbang sehingga tujuan pendidikan politik bukan sekedar tercapainya individu yang bebas sebagaimana tuntutan hak asasi liberal, melainkan tercapainya suatu pribadi yang bebas, sekaligus juga bertanggungjawab terhadap kehidupan negara dan kehidupan sosialnya.

Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan, mengapa orientasi pendidikan politik perlu diperluas bukan berorientasi pada nilai-nilai politik dalam arti kekuasaan tetapi pada nilai-nilai yang terkandung dalam HAM. Pertama, hak politik merupakan bagian kecil dari HAM. Kedua, hak asasi manusia merupakan salah satu isu yang menonjol pada era globalisasi ini. Segala bentuk kerja sama antar negara, bahkan sampai dalam hal pengambilan kebijakan pemberian pinjaman kepada negara lain selalu dikaitkan dengan HAM. Ketiga, pendidikan politik secara esensial adalah proses pendewasaan pribadi manusia dalam bidang politik. Proses pendewasaan pribadi manusia ini tidak boleh tidak selalu terkait dengan konsep-konsep kemanusiaan yang luhur. Konsep kemanusiaan yang luhur ini termuat dalam HAM. Pemahaman konsep HAM yang benar akan membawa peserta didik menjadi orang yang bertanggung jawab dalam bidang politik. Artinya, orang yang mampu menempatkan tata urutan nilai yang benar; orang yang selalu menempatkan nilai kemanusiaan sebagai nilai yang berada di atas nilai-nilai yang bersifat kebendaan dan nilai kekuasaan dalam setiap pengambilan kebijakan dalam bidang politik.

Perluasan orientasi pendidikan politik pada nilai-nilai HAM ini memungkinkan orang tidak terkotak dalam pengertian politik dalam arti sempit yaitu sebagai upaya mencari dan mempertahankan kekuasaan. Dengan pemahaman tersebut memungkinkan seseorang menjadi sadar akan hak dan kewajibannya bukan saja sebagai warga negara, melainkan menjadi seseorang yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai manusia yang bermartabat luhur.

### Pendidikan Politik melalui MKU

Dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi, gagasan mengenai pendidikan politik yang berorientasi pada nilai-nilai HAM sebagaimana dijelaskan di atas

dapat dilaksanakan secara integratif dalam semua mata kuliah umum (MKU). Mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewiraan, PKLH, Filsafat Pancasila, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar pada hakikatnya dapat disisipi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam HAM. Pokok bahasan-bahasan yang relevan dapat disisipi dengan materi-materi HAM sehingga secara implisit mahasiswa dapat menyerap nilai-nilai HAM melalui pokok-pokok bahasan yang terdapat pada MKU.

Sosialisasi HAM secara integratif melalui MKU tentunya berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Materi-materi HAM yang disisipkan dalam semua MKU ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan di mana ketiapa nilai dasar ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, pemberian materi HAM yang berkaitan dengan hak asasi demokratis tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan. Bagaimana pun nilai demokrasi ini dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijabarkan secara kontekstual mengacu pada nilai-nilai budaya setempat. Praktik demokrasi di suatu negara seharusnya berlandaskan pada nilai budaya sopan santun yang berlaku sehingga makna demokrasi tidak menjadi terdistorsi. Tanpa kriteria ini, demokrasi tidak akan berjalan, tetapi yang terjadi justru disintegrasi.

Jika gagasan ini diterima, kiranya tidak berlebihan jika jurusan MKU IKIP Yogyakarta dapat memelopori upaya mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam semua mata kuliah umum (MKU), terlebih dengan rencana pengembangan IKIP Negeri Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan turunnya SK Dikti Depdikbud No. 1499/DT/1996 tentang penetapan perluasan tugas (*wider mandate*) ke arah perubahan kelembagaan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas (Bernas, 8 Juli 1996), rencana itu menjadi semakin mendekati kenyataan. Salah satu upaya menindaklanjuti SK itu adalah pengembangan sarana dan prasarannya. Pengembangan bidang pendidikan pengajaran tentunya merupakan salah satu bagian penting dalam proses ini. Unit Pelaksana Teknis MKU IKIP Yogyakarta tentunya dapat mengawali atau mengambil langkah pertama sehingga dapat menjadi perintis dalam melaksanakan proses belajar mengajar MKU yang berorientasi pada nilai-nilai HAM. Bagaimana pun semua dosen MKU dituntut untuk mendalami substansi dari mata kuliah yang dipegangnya, sehingga melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3 menjadi suatu keharusan. Selain pemahaman substansi mata kuliahnya, juga harus mempunyai wawasan yang komprehensif mengenai Konsep Hak Asasi Manusia. Tanpa kedua modal ini, dosen MKU tidak dapat

menjalankan misi dan visinya, bahwa MKU sebenarnya merupakan sarana pendidikan politik dalam pengertian sebagai sosialisasi nilai-nilai HAM. Dengan internalisasi nilai-nilai HAM ini diharapkan peserta didik bukan saja sadar akan kedudukannya sebagai warga negara, tetapi semakin sadar akan kemartabatan sebagai manusia.

Integrasi nilai-nilai HAM ke dalam semua MKU bukan pekerjaan mudah bagi setiap dosen. Untuk tujuan ini, diperlukan keahlian khusus meramu substansi mata kuliahnya masing-masing dengan konsep HAM, sehingga menjadi bahan kuliah yang bernuansa HAM, misalnya, substansi mata Kuliah Pendidikan Kewiraan adalah bela negara. Dengan keahliannya, dosen kewiraan akan menyajikan bahan-bahan pengajaran yang bahan dasarnya bela negara menjadi bernuansa HAM. Hal ini dapat dianalogikan dengan seorang ahli masak yang membuat sambal. Sambal yang bahan dasarnya cabai di tangan seorang ahli masak akan menjadi santapan yang lezat. Dengan tambahan bumbu-bumbu akan menjadi sambal yang wujudnya lain sama sekali dengan bahan dasarnya.

Strategi yang harus ditempuh untuk tercapainya keahlian sebagaimana dijelaskan di atas adalah :

1. Diadakan seminar yang berkaitan dengan konsep HAM sehingga pemahaman setiap dosen MKU tentang HAM lebih komprehensif.
2. Diadakan pelatihan atau semiloka tentang HAM yang diintegrasikan ke dalam MKU.
3. Evaluasi yang berkesinambungan tentang pengintegrasian ini, berdasarkan penelitian-penelitian yang ada.

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik yang ada selama ini lebih menekankan pada dimensi kekuasaan, stabilitas keamanan, dan hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak menyentuh dimensi hidup manusia yang paling hakiki, yaitu Hak Asasi Manusia. Kondisi ini, pada akhirnya akan membawa pada praktik politik yang kurang manusiawi dan secara nyata mengarah pada terjadinya krisis politik yaitu hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
2. Pendidikan politik perlu diperluas orientasinya pada sosialisasi nilai-nilai HAM yang meliputi hak asasi liberal, hak asasi demokratis, hak asasi positif, dan hak asasi sosial. Sosialisasi keempat macam HAM ini harus dilaksanakan secara seimbang, sehingga makna HAM tidak terdistorsi.
3. Pendidikan politik yang berorientasi pada nilai-nilai HAM ini secara khusus di Perguruan

Tinggi dapat dilakukan secara kurikuler atau pun ekstra kurikuler. Secara kurikuler, semua mata kuliah umum dapat disisipi nilai-nilai HAM ini. Unit pelaksana teknik MKU IKIP Yogyakarta yang pada saat ini sedang menghadapi peralihan menjadi Universitas dapat mengawali atau merintis untuk mengembangkan proses belajar mengajar MKU yang mempunyai misi dan visi pada nilai-nilai HAM.

4. Strategi yang seharusnya diambil untuk mengantisipasi hal tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (dosen) MKU dengan mengikuti studi lanjut ke S2 atau S3, pelaksanaan seminar yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, semiloka tentang pengintegrasian HAM ke dalam seluruh mata kuliah umum, dan terakhir evaluasi keberhasilan integrasi HAM ke dalam MKU melalui penelitian-penelitian.

#### Daftar Pustaka

- Alfian. (1986). *Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Andriani Purwastuti, Lusila. (1997). *Pendidikan Politik dalam Pengajaran MKU Ditinjau dari Teori Komunikasi J. Habermas*. Thesis Program Pasca Sarjana. Yogyakarta: UGM.
- Andriani Purwastuti, Lusila. (1998). *Analisis Isi terhadap Materi Pembelajaran Pendidikan Politik dalam MKU*. Hasil Penelitian. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta.
- Bernadib, Iman. (1994). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kurikulum Inti Mata Kuliah Umum*. Jakarta: Dikti.
- Heuken, SJ, dkk. (1988). *Ensiklopedi Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Instruksi Presiden RI. No. 12 Tahun (1982), tgl. 11 April 1982 tentang *Pendidikan Politik bagi Generasi Muda*.
- Karsimin, Akung, dkk. (1980). *Sumbangan Mata Kuliah Umum terhadap Pengembangan Sikap Patriotisme di Kalangan Mahasiswa FPIPS IKIP Yogyakarta*. Hasil Penelitian. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta.
- Magnis Suseno, Franz. (1994). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mas'ood, Mochtar dan Colin Mac Andrew. (1986). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prawiroputro, Ekram, dkk. (1993). *Eksplorasi Wawasan Politik Mahasiswa IKIP Yogyakarta*. Hasil Penelitian. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta.
- Sanit, Arbi. (1982). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Shadily, Hasan. (1992). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Subakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sunarso, (1995). *Kontribusi MKDU terhadap Pembentukan Sikap Nasionalisme Mahasiswa dan Implikasinya pada Ketahanan Nasional*. Thesis Program Pasca Sarjana. Yogyakarta: UGM.
- Vembriarto, ST. (1993). *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: PT Gramedia.